

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik Supriyanto, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, 2009, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2015, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan, Jakarta.
- Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Syamsudin Alimsyah, 2013, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*, Kemitraan, Jakarta.
- Veri Junaidi, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### **Jurnal, Laporan Studi, dan Tesis**

Alit Amarta Adi, 2012, *Tesis: Politik Hukum Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia*, Universitas Gajah Mada.

Charles Simabura, *Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,*

dan DPRD. Volume 21 Nomor 2, Juli-Desember., Jurnal Ilmu Hukum YUSTISIA Universitas Andalas 2014.

Emmy Hafild, 2008, *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*, Transparency International Indonesia dan Transparency International, Jakarta.

Rooseno, 2014, *Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

### Website

Alit Amarta Adi, Politik Hukum Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia. [baramerahputih.blogspot.co.id/2013/07/naskah-publikasi-tesis-politik-hukum.html](http://baramerahputih.blogspot.co.id/2013/07/naskah-publikasi-tesis-politik-hukum.html)

Donita Paskalina Tamba, Rekomendasi Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia: Standar Pengaturan Keuangan Partai Politik. <http://donitapaskalina.blogspot.com/2013/07/rekomendasi-pengaturan-keuangan-partai.html?m=1>.

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik. <http://www.perludem.org/index.php?option=com..>

<http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-keluarkan-peraturan-keuangan-parpol-harus-diaudit-bpk/36523>.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/15070011/Besaran.Bantuan.Partai.Politik>.

<http://nusantaranews.wordpress.com/2009/05/16/sby-mega-jk-wiranto-penerima-dana-korupsi-dkp-2004-kembali-nyapres/>

<http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2013/01/30/kronologi-kasus-suap-daging-impor-terkait-anggota-dpr-luthfii-hasan/>

[m.beritasatu.com/nasional/259034-perludem-desak-parpol-pastikan-kebutuhan-dana.html](http://m.beritasatu.com/nasional/259034-perludem-desak-parpol-pastikan-kebutuhan-dana.html)

[m.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol](http://m.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol).

[Sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/12/sistem-pemerintahan-jerman.html?](http://Sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/12/sistem-pemerintahan-jerman.html?)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.kemitraan.co.id](http://www.kemitraan.co.id)

[www.temponews.com](http://www.temponews.com)

[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

